

RENCANA KERJA TAHUN 2026



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PARIWISATA

exciting
banten 

wonderful
indonesia 



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PARIWISATA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi, Kec. Curug - Kota Serang
Laman : <https://dispar.bantenprov.go.id>, Pos-el: dispar@bantenprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 500.13/100-DISPAR/2025
TENTANG**

**RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Unit Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten tentang Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

8. Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2020
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
13. Peraturan Gubernur nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Uraian Tuga Dinas Daerah:
14. Peraturan Gubernur nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TENTANG RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2026**

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pariwisata tahun 2026 di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS

Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si
NIP. 19730608 200212 2 003



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PARIWISATA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi, Kec. Curug - Kota Serang
Laman : <https://dispar.bantenprov.go.id>, Pos-el: dispar@bantenprov.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 500.13/101-DISPAR/2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Unit Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten tentang Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023;
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 14. Peraturan Gubernur nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TENTANG TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten selaku Penanggung Jawab Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026;
- b. Mengumpulkan bahan dalam perumusan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026;
- c. Menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi

Banten Tahun 2026 dengan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA poin c merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pariwisata tahun 2026 di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS

Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si

NIP. 19730608 200212 2 003

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Nomor : 500.13/101-DISPAR/2025

Tanggal : Juli 2025

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si	Penanggungjawab
2	Euis Widyaningrum, S.Ag, M.Si	Ketua
3	Sumarsono, SE.	Sekretaris
4	Sunandar, SH, M.Si	Anggota
5	Puti Andam Dewi, SE.	Anggota
6	Ratu Iloh Rohayati, SE, MM	Anggota
7	Ina Inayah, S.Sos, M.Si	Anggota
8	Ratu Wawat Irawati, S.AP, M.Si.	Anggota
9	Eri Sujatnika, S.S.	Anggota
10	Dra. Teten Yenni, M.Si.	Anggota
11	Ahmad Rizal M., S.Pd, MM.	Anggota
12	Juniawati Prihartanty, SE. M.Si.	Anggota
13	Suplihah, SE. M.Si.	Anggota
14	Endang Saputra, S.Pd.i, M.A.	Anggota
15	Sri Haryati, S.Ag.	Anggota
16	Rohaendi, S.Pd.	Anggota
17	Ratu Niken Soraya, S.Sos.	Anggota
18	Chairul Anwar, A.Md	Anggota
19	Mungguh Jaya Mandala, S.STP	Anggota
20	Setio Suryo Suncoko, S.Pd	Anggota

Plt. KEPALA DINAS

Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si

NIP. 19730608 200212 2 003

**JADWAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA
TAHUN 2026**

NO	BULAN	PENYUSUNAN RENJA	KETERANGAN
1	Januari 2025	Penyusunan Rancangan Awal RENJA Tahun 2025	Berdasarkan Jadwal dari Bappeda
2	04 Juli 2025	Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026	Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2025
3	30 Juli 2025	Penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2026	Surat Edaran Nomor 38 Tahun 2025
4	06 November 2025	Penyusunan Finalisasi Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026	Surat Edaran Nomor 59 Tahun 2025
5	11 November 2025	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (RKA-SKP) provinsi Banten Tahun Anggaran 2026	Surat Edaran Nomor 61 Tahun 2025
6	26 Desember 2025	Penyempurnaan RENJA dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun 2026	Surat Edaran No 74 tahun 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji Syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT Tuhan YME atas rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan "**Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2026**" dalam penyusunan buku ini diharapkan dapat memenuhi rencana kerja pembangunan Provinsi Banten melalui bidang Pariwisata.

Penyusunan Rencana Kerja suatu instansi pemerintah mutlak dilakukan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan demi tercapainya cita-cita pembangunan dalam rentang waktu satu tahun ke depan. Oleh Karena itu, Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2026 ini disusun untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi Provinsi Banten yaitu **BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAHLAKUL KARIMAH** dapat terwujud.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2026, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Serang, Juli 2025
Plt. KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si
NIP. 19730608 200212 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PARIWISATA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata.....	16
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA	50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata	63
3.3 Program dan Kegiatan.....	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA	87
BAB V PENUTUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024	6
Tabel 2.2	Rekapitululasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata provinsi Banten s/d tahun 2024	7
Tabel 2.3	Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025 dan tahun 2026	11
Tabel 2.4	Obyek Wisata Provinsi Banten	12
Tabel 2.5	Analisis Kinerja Layanan Perangkat Daerah.....	14
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
Tabel 2.7	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
Tabel 2.8	Tantangan dan Peluang	25
Tabel 2.9	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	27
Tabel 2.10	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	45
Tabel 3.1	Tabel Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata	51
Tabel 3.2	Target Kinerja Kementerian Pariwisata	53
Tabel 3.3	Arah Kebijakan, Strategi, Program, dan Lini Masa Kemenekraf/Bekraf Periode 2025-2029	54
Tabel 3.4	Target Kinerja Kemenekraf/Bekraf 2025-2029	56
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Faktor Pendoron Terhadap Renstra Kementerian/ Lembaga	57
Tabel 3.6	Keterkaitan Misi dalam RPJMD dengan Renstra Dinas Pariwisata	61
Tabel 3.7	Arah Kebijakan Tahunan Dinas Pariwisata.....	62
Tabel 3.8	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata	64
Tabel 3.9	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	68
Tabel 3.10	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	80
Tabel 4.1	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pariwisata, merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan yang berfungsi sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah. Renja Tahun 2026 menjadi dokumen rencana kerja tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025–2029. Selain itu, Renja ini juga merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2026.

Renja memiliki fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan dinas. Dengan demikian, Renja berperan sebagai jembatan yang menyinkronkan dan mengharmoniskan arah strategis lima tahunan ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkret, terukur, dan operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 dilakukan melalui mekanisme penjangkauan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Aspirasi tersebut diformulasikan dalam Forum Perencanaan Pembangunan bidang pariwisata, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Selanjutnya, Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025–2029.

Forum perencanaan pembangunan bidang pariwisata diselenggarakan dengan tujuan membangun kesepahaman di antara pelaku pembangunan, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, maupun masyarakat. Forum ini menjadi ruang penting untuk menyinkronkan sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan tahun anggaran 2026, sehingga menghasilkan rancangan akhir Renja yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan pariwisata di Provinsi Banten.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, Renja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 memuat penjabaran rencana strategis yang terdiri atas program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif beserta prakiraan maju Tahun 2027. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen penting yang menghubungkan perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan pembangunan tahunan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

1.1. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Banten disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 12) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1);
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2016);
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5);
 - 16) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
 - 17) Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - 18) Peraturan Gubernur nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 dimaksudkan untuk mendokumentasikan rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Renja ini menjadi instrumen penting dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan pariwisata yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025–2029, serta prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026.

Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam kurun waktu satu tahun anggaran;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
3. Menyediakan dasar bagi sinkronisasi dan harmonisasi antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Dinas) dengan rencana tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah);
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) khususnya yang terkait dengan program pembangunan pariwisata;
5. Mendukung integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta Renja Kementerian/Lembaga yang relevan, sehingga pembangunan

pariwisata Provinsi Banten selaras dengan kebijakan nasional maupun regional.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PARIWISATA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PARIWISATA

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan program & kegiatan, dan hasil pelaksanaan program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk komitmen dan konsisten melaksanakan pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Berikut ini adalah tabel evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2024 dan pencapaian Renstra :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	Tahun 2025 s/d Tw I	Tahun 2025	
1	Capaian SAKIP (satuan : nilai)		V	BB	BB	BB	BB	A	BB		BB	
2	Persentase Kunjungan Jumlah Wisatawan (Satuan : Orang)		V	20.060.922	21.063.968	22.117.167	23.223.025	25.664.013	22.465.192		22.117.167	
3	Rata-Rata Lama inap (satuan : Hari)		V	1,66	1,72	1,78	1,84	1,51	1,37		1,78	
4	Rata-rata pengeluaran Wisatawan (satuan : Rp)		V	4.998.799	5.248.739	5.511.176	5.786.735	2.347.107	3.172.274		5.511.176	
5	Persentase SDM yang memiliki sertifikat di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (satuan : persen)		V	600	600	600	600	2.265	2.553		600	

Tabel 2.2
Rekapitululasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan
Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata provinsi Banten s/d tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Han Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat tahun(n- 1)2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	DINAS PARIWISATA												
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	BB	A	BB	A	A	BB	A	A	
3	26	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Han Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat tahun(n-	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat	Realisasi Renja Perangkat	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	26	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-Rata Lama inap Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	1,72	1,51	1,72	1,37	79,65	1,78	466%	271%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Han Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat tahun(n-	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat	Realisasi Renja Perangkat	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	26	02	1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	02	1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	02	1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	02	1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kunjungan Jumlah Wisatawan	5%	5%	5%	5%	100%	5%	15%	300%
3	26	03	1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Han Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat tahun(n-	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat	Realisasi Renja Perangkat	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	5.248.739	2.347.107	5.248.739	3.172.274	60,44	5.511.176	11.030.557	210%
3	26	04	1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	04	1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	05	1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
3	26	05	1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

Tabel 2.3
Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025 dan tahun 2026

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	
		2025	2026
1	URUSAN PILIHAN	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
2		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
4		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Provinsi Banten merupakan provinsi ke-30 di Indonesia yang secara yuridis dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sebagai provinsi yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, Banten merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Secara administratif luas wilayah Provinsi Banten 8.794,01 Km² dan dibatasi oleh :

- Sebelah Barat : Selat Sunda (Provinsi Lampung)
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Provinsi DKI Jakarta & Jawa Barat
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Dengan dukungan prasarana dan sarana yang cukup memadai sektor pariwisata di Provinsi Banten berkembang cukup pesat. Hal ini terlihat dari banyak tersebarnya kawasan wisata baik berupa wisata pantai, wisata tirta, wisata sejarah/budaya dan wisata suka alam, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah makan, cottage dan lain-lain yang banyak tersebar terutama di kawasan pesisir pantai Barat Banten.

Berdasarkan hasil pengelompokan (clustering) obyek-obyek wisata yang ada di Provinsi Banten sampai dengan tahun 2024, terdiri dari :

Tabel 2.4
Obyek Wisata Provinsi Banten

No	Kabupaten /Kota	Wisata Buatan	Wisata Alam	Wisata Budaya	Lain-lain	Minat Khusus	Wisata Religi	Total
1	Kabupaten Lebak	9	25	4	2	1	2	43
2	Kabupaten Pandeglang	25	74	24	0	0	68	191
3	Kabupaten Serang	12	37	2	7	10	4	72
4	Kabupaten Tangerang	5	26	0	6	4	3	44
5	Kota Cilegon	5	2	0	0	3	1	11
6	Kota Serang	4	15	3	0	18	1	41
7	Kota Tangerang	13	5	0	2	0	1	21
8	Kota Tangerang Selatan	24	0	1	19	3	13	60
	TOTAL	97	184	34	36	39	93	483

Kawasan pengembangan pariwisata sebagian telah berkembang menjadi obyek wisata nasional maupun internasional, seperti Kawasan Pantai Anyer-Carita, Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, Living Culture Baduy, TN. Ujung Kulon, Sawarna dan Bagedur dan Kawasan Banten Lama. Namun, berkembangnya kawasan wisata tersebut secara umum masih terkonsentrasi pada wilayah utara dan barat Provinsi Banten. Adapun kawasan-kawasan pengembangan wisata di wilayah selatan relatif belum berkembang terutama disebabkan oleh masih terbatasnya infrastruktur pendukung (transportasi, Amenitas dan akomodasi wisata).

Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan mutiplier effect bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata seperti industri kerajinan dan souvenir, jasa biro perjalanan, hotel dan penginapan, dan lain-lain. Dengan berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara, yang datang berkunjung sehingga diharapkan terjadi penciptaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten.

Sejalan dengan bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata yang dilakukan, perubahan menuju terwujudnya kemapanaan tata pemerintahan telah menampakkan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek dan jangka menengah) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Mempedomani Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten periode tahun 2025-2029, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah melalui upaya :

1. Peningkatan keragaman dan pengembangan daya tarik destinasi wisata,
2. Peningkatan dukungan fasilitas dan amenities destinasi wisata,
3. Peningkatan aksesibilitas pasar terhadap destinasi,
4. Peningkatan intensifikasi dan diversifikasi usaha pariwisata,
5. Peningkatan komprehensif destinasi wisata,
6. Fasilitasi penyelesaian kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap keberadaan destinasi wisata,
7. Fasilitasi peningkatan konektivitas antar destinasi wisata,
8. Fasilitasi peningkatan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif baik di dalam kawasan destinasi maupun diluar kawasan destinasi wisata
9. Peningkatan efektivitas publikasi dan promosi pariwisata,
10. Peningkatan peran usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam dan atau luar lokasi destinasi wisata,
11. Fasilitasi peningkatan harmonisasi dan keterpaduan pembangunan pariwisata.
12. Penerapan standar kompetensi dan standar usaha pariwisata.
13. Fasilitasi penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta.
14. Penguatan lembaga dan kelembagaan pariwisata.
15. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur.
16. Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur.
17. Peningkatan kualitas data dan informasi.

Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2024 melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pengukuran yang mengacu kepada Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya adalah sebagai berikut

Tabel 2.5
Analisis Kinerja Layanan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	85	85	100
2	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21.063.968	22.465.192	107

Dari gambaran capaian kinerja diatas, terindikasi beragam permasalahan dalam pencapaian indikator-indikator kinerja. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap upaya pengembangan pariwisata. Faktor-faktor tersebut meliputi :

FAKTOR INTERNAL :

1. Pemanfaatan data dan informasi belum optimal
2. Sinergitas pelaksanaan program kegiatan lintas bidang belum optimal
3. Kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Banten belum optimal
4. Strategi pengembangan dan pemasaran produk belum berorientasi terhadap pasar wisata Banten
5. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata
6. Rendahnya diversifikasi daya tarik wisata yang ditawarkan kepada wisatawan
7. Minimnya atraksi wisata di destinasi wisata
8. Belum optimalnya pelayanan pelaku usaha dan industri pariwisata terhadap wisatawan
9. Belum optimalnya peran masyarakat terhadap pengembangan pariwisata

FAKTOR EKSTERNAL :

1. Dukungan infrastruktur jalan menuju obyek wisata belum maksimal
2. Sinergitas program lintas sektor belum maksimal

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Capaian SAKIP (satuan : nilai)			BB	BB	BB		A	B	BB		
	Persentase Kunjungan Jumlah Wisatawan			5%	5%	5%		5%	5%	5%		
	Rata-Rata Lama inap			1,66	1,72	1,78		1,51	1,37	1,78		
	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan			4.998.799	5.248.739	5.511.176		2.347.107	3.172.274	5.511.176		
	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual						6,91				6,91	
	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi						2,41				2,41	
	Persentase Peningkatan Promosi Objek Wisata Provinsi						5,18				5,18	
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan						5,2				5,2	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

2.3.1 Kinerja pelayanan peragka daerah dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Dengan berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, yang datang berkunjung sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan nilai tambah pajak, meningkatkan pendapatan asli daerah serta dapat menumbuhkan sektor-sektor lainnya, seperti industri kerajinan, makanan/kuliner dan lain-lain.

Pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan Kemitraan yang koheren antara para pelaku kepariwisataan – masyarakat, usaha swasta dan pemerintah; Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat; berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat.

Selanjutnya masalah keamanan menjadi perhatian serius. Masalah keamanan telah menciptakan citra yang sangat kurang menguntungkan bagi industri pariwisata, dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama telah terusik akibat aksi bersifat negatif di destinasi maupun fasilitas pariwisata serta didorong dengan adanya pandangan bahwa saat ini tidak ada destinasi yang aman untuk berwisata.

Masalah kesehatan juga menjadi perhatian serius dalam pengembangan kepariwisataan. Penyebaran penyakit berakibat kurang menguntungkan bagi pergerakan wisatawan. Antisipasi dalam mencegah penyebaran penyakit serta keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam menciptakan daya tarik bagi calon wisatawan untuk kembali melakukan perjalanan wisata.

Pembangunan pariwisata harus memperhatikan pula perkembangan isu strategis pada tataran pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2025-2029, meliputi :

- 1) Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian,
- 2) Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global,
- 3) Pelaksanaan penerapan Standar Operasional dan Prosedur,
- 4) Kesenjangan pembangunan kewilayahan antara Wilayah Utara dengan Wilayah Selatan,

- 5) Penerapan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- 6) Lemahnya tingkat kreativitas kewirausahaan masyarakat di lingkungan destinasi wisata

Isu strategis yang berkaitan langsung dengan pembangunan pariwisata di kabupaten/kota diantaranya, Kawasan Pantai Wisata Anyer dan Pulau Tunda beserta Pulau Sanghiyang; Perlunya dukungan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, air bersih dan listrik terhadap pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Pulau Umang; Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Carita dan Kawasan Wisata Alam serta Wisata Religi; Perlunya pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya; Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sawarna dan Bagedur, Kawasan Wisata Alam Arung Jeram Ciberang serta Wisata Religi dan Pelestarian Situs Benda Purbakala dan Masjid Banten Lama.

Tantangan pembangunan pariwisata dihadapkan pada :

1. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata
2. Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Secara internal, tantangan pembangunan pariwisata dihadapkan pada situasi belum optimalnya :

1. Sarana dan Prasarana peningkatan produk ekonomi kreatif
2. Promosi Pariwisata yang menarik wisatawan
3. SDM Pariwisata dan Ekraf yang bersertifikat
4. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata

Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pariwisata, selanjutnya isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata

Berdasarkan Buku PDRB (product domestic regional bruto) yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten setiap tahunnya (rata – rata) dimana dari 13 usaha pariwisata yang berkontribusi signifikansi terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata hanya pada 2 (dua) jenis usaha yaitu ; akomodasi dan restaurant / rumah makan yang pertumbuhannya di atas rata –rata sementara 11 usaha lainnya yang berada di bawah yaitu :Daya tarik wisata,Kawasan pariwisata,Jasa transportasi wisata,Jasa perjalanan wisata, Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, Jasa informasi pariwisata, Jasa konsultan pariwisata, Jasa pramuwisata, Wisata tirta dan SPA

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa perhitungan usaha pariwisata belum seluruhnya berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan sektor pariwisata permasalahan ini akan terus berulang bila tidak segera ditindaklanjuti.

1. Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pembangunan kepariwisataan memerlukan kontribusi sektor pariwisata yang memadai dengan kata lain memerlukan pertumbuhan nilai ekonomi yang baik. Hal ini dapat terlihat dari parameter kontribusi sektor pariwisata PDRB (product domestic regional bruto) atas harga berlaku Provinsi Banten tahun 2024 sebesar 2,35 persen

Sementara untuk pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang di dalamnya terdiri dari 17 sub sektor ekonomi kreatif yang terdiri dari ;

1. Pengembangan Permainan
2. Arsitektur
3. Desain Interior
4. Musik
5. Seni Rupa
6. Desain Produk
7. Fashion
8. Kuliner
9. Film, Animasi dan Video
10. Fotografi
11. Desain Komunikasi Visual
12. Televisi dan Radio
13. Kriya
14. Periklanan
15. Seni Pertunjukan
16. Penerbitan
17. Aplikasi

Terhadap 17 sub sektor ekonomi kreatif yang berkembang dan tumbuh memiliki nilai ekonomis di wilayah Provinsi Banten adalah kuliner, kriya dan fashion sementara untuk 14 sub sektor ekonomi kreatif lainnya tumbuh kurang optimal. Diantaranya terdapat 3 (tiga) kendala besar yang berdampak terhadap pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu;

- a. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
- b. Belum Optimalnya Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif
- c. Belum Tersedianya Ruang Kreatif / Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata;
2. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan;

4. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
5. Merumuskan penyelenggaraan;
 - a. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata,
 - b. Pemasaran pariwisata;
 - c. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - d. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi;
7. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi, dan pelaporan Dinas Pariwisata;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Pariwisata Provinsi Banten masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian target pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pada bidang destinasi, permasalahan utama adalah belum optimalnya penataan dan pengelolaan objek wisata. Banyak destinasi belum memiliki daya tarik khas, fasilitas dan amenities masih terbatas, serta aksesibilitas menuju lokasi wisata belum memadai. Hambatan yang muncul terkait dengan keterbatasan anggaran, pengelolaan yang belum profesional, serta minimnya investasi dari pihak swasta maupun kerja sama lintas sektor.

Dalam pemasaran pariwisata, promosi yang dilakukan masih bersifat temporer dan belum berbasis strategi terpadu. Media promosi yang digunakan belum efektif, sementara segmentasi pasar wisata masih lemah. Hal ini membuat potensi kunjungan wisatawan belum termanfaatkan secara maksimal.

Di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif, tantangan yang dihadapi adalah belum adanya roadmap pengembangan yang jelas, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya daya saing pelaku usaha. Hambatan lainnya adalah ketiadaan lembaga fasilitator, lemahnya publikasi, dan terbatasnya partisipasi pelaku usaha dalam sertifikasi maupun kompetisi.

Sedangkan dalam pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, kualitas tenaga kerja masih terbatas dan sebagian besar belum memiliki sertifikasi kompetensi. Kebijakan pengembangan SDM juga belum sepenuhnya partisipatif, sementara masyarakat di sekitar destinasi cenderung homogen dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lambat.

Secara keseluruhan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama:

1. Struktural – regulasi, koordinasi, dan dukungan anggaran yang masih terbatas.
2. Teknis – fasilitas dan amenities belum lengkap, promosi belum efektif, serta keterbatasan SDM.
3. Sosial-ekonomi – rendahnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, serta daya saing yang masih lemah.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui kebijakan yang terarah, kolaboratif, dan inovatif, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Banten diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun Permasalahan, faktor penghambat dan faktor pendorong dapat di lihat pada tabel;

Tabel 2.7

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

TUPOKSI	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Bidang Destinasi Pariwisata	Belum Optimalnya Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata yang dilakukan oleh Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	obyek wisata yang kurang/tidak memiliki daya tarik/unik dari obyek wisata di daerah lain.	kebijakan dan fasilitasi peningkatan nilai tambah destinasi dengan amenities, fasilitas, dan atraksi yang aksesibilitas
		obyek wisata yang menarik dan unik umumnya memiliki skala jangkauan yang kecil.	kebijakan dan fasilitasi peningkatan keragaman daya tarik melalui atraksi atau rekayasa kebijakan yang aksesibilitas
		daya saing dan nilai obyek wisata yang lemah	kebijakan dan fasilitasi keterlibatan investasi, UMKMK, BUMD, PMDN, dan PMA, dan atau KPS
		pengelola destinasi yang belum profesional	kebijakan dan fasilitasi keterlibatan investasi, UMKMK, BUMD, PMDN, dan PMA, dan atau KPS
		belum lengkapnya fasilitas dan amenities yang ada di daerah destinasi wisata	kebijakan dan fasilitasi penyediaan amenities dan fasilitas di kawasan destinasi
		kurang optimalnya ketersediaan dan kelayakan fasilitas aksesibilitas menuju destinasi wisata	kebijakan dan fasilitasi penyediaan amenities dan fasilitas di kawasan destinasi

TUPOKSI	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Bidang Pemasaran Pariwisata	Belum Optimalnya Promosi Pariwisata yang menarik wisatawan.	Pemasaran dan atau promosi pariwisata yang diikuti skala internasional, nasional, regional, dan lokal lebih bersifat temporer, bukan bersifat sistemik	kebijakan dan fasilitasi sistem promosi dan pemasaran yang menyeluruh.
		keterbatasan materi pemasaran dan promosi pariwisata yang belum tepat sasaran	kebijakan dan fasilitasi materi promosi melalui KKL yang bersifat vertikal dan horizotal dengan pelibatan para pihak terkait
		Keterbatasan media pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif	kebijakan dan fasilitasi seleksi media yang efektif dan efisien
		keterbatasan informasi sasaran dan target pemasaran	kebijakan dan fasilitasi materi promosi dan media promosi melalui pelibatan para pihak terkait yang bersifat vertikal dan horizotal.
Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Minimnya Sarana dan Prasarana peningkatan produk ekonomi kreatif	belum tersedianya roadmap ekonomi kreatif banten yang detail sebagai pemicu kreatifitas publik	kebijakan dan fasilitasi pembangunan roadmap ekonomi kreatif banten yang komprehensif, komunikatif, dan bertanggung jawab
		belum kompetitifnya dunia usaha ekonomi kreatif karena kelemahan data, informasi, dan publikasi	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya motif ekonomis dan aktivitas kompetisi melalui berbagai forum secara proposional
		belum tersedianya lembaga yang mampu memfasilitasi perkembangan kemajuan ekonomi kreatif	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya lembaga yang mampu memfasilitasi perkembangan ekonomi kreatif

TUPOKSI	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		belum optimalnya partisipasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam upaya peningkatan daya saing seperti sertifikasi	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya event yang bersifat lomba dan kompetisi
		belum tersedianya roadmap ekonomi kreatif banten yang detail sebagai pemicu kreatifitas publik	kebijakan dan fasilitasi pembangunan roadmap ekonomi kreatif banten yang komprehensif, komunikatif, dan bertanggung jawab
		belum kompetitifnya dunia usaha ekonomi kreatif karena kelemahan data, informasi, dan publikasi	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya motif ekonomis dan aktivitas kompetisi melalui berbagai forum secara proposional
		belum tersedianya lembaga yang mampu memfasilitasi perkembangan kemajuan ekonomi kreatif	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya lembaga yang mampu memfasilitasi perkembangan ekonomi kreatif
		belum optimalnya partisipasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam upaya peningkatan daya saing seperti sertifikasi	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya event yang bersifat lomba dan kompetisi
Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terbatasnya SDM Pariwisata dan Ekraf yang bersertifikat	belum adanya arah kebijakan pengembangan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang partisipatif dan komunikatif sebagai pengembangan potensi masyarakat, khususnya di sekitar destinasi	kebijakan dan fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang partisipatif dan komunikatif
		homogenitas masyarakat di	kebijakan dan fasilitasi yang

TUPOKSI	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		kawasan destinasi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lambat	meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial sebagai entry point pengembangan sumberdaya manusia

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Dampak Permasalahan dan Hambatan terhadap Pencapaian Visi-Misi, Program Nasional, dan SDGs

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas Dinas Pariwisata Provinsi Banten memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian visi-misi kepala daerah, keterkaitannya dengan program nasional, serta agenda pembangunan global;

a. Dampak terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi kepala daerah untuk mewujudkan *Banten maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera melalui sektor pariwisata* belum dapat tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tertatanya destinasi secara baik, keterbatasan fasilitas dan amenities, serta promosi yang belum berjalan efektif. Kondisi tersebut membuat pariwisata belum sepenuhnya berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Dampaknya terlihat pada misi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi lokal yang masih berjalan terbatas.

b. Dampak terhadap Program Nasional

NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria): Belum sepenuhnya terimplementasi, khususnya terkait standar pengelolaan destinasi, layanan wisata, dan kualitas SDM pariwisata.

c. SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pariwisata:

Belum merata, karena masih banyak destinasi wisata yang minim informasi, kurang fasilitas umum, serta belum memiliki jaminan keamanan yang layak bagi wisatawan.

d. Dampak terhadap SDGs (Sustainable Development Goals)

Hambatan dalam sektor pariwisata berpengaruh langsung terhadap pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, di antaranya: Belum optimal karena daya saing destinasi masih rendah sehingga pariwisata belum mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, Terhambat oleh keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur dasar di kawasan wisata, Tata kelola destinasi wisata belum sepenuhnya memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dan Kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dunia usaha, maupun masyarakat, masih belum berjalan optimal.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan utama Dinas Pariwisata Banten terletak pada belum meratanya kualitas destinasi, keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas, rendahnya kompetensi SDM pariwisata, serta promosi yang belum terintegrasi digital. Koordinasi lintas sektor juga masih lemah, sementara persaingan dengan daerah lain dan tuntutan wisata berkelanjutan semakin kuat.

Banten memiliki peluang besar melalui kekayaan destinasi unggulan bahari, budaya, dan alam; dukungan kebijakan nasional dan daerah; pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan pelayanan; meningkatnya partisipasi masyarakat melalui desa wisata dan UMKM; serta tren wisata berkelanjutan yang sesuai dengan potensi lokal. Jika tantangan dapat diatasi, Banten berpeluang menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.8
Tantangan dan Peluang

No	TANTANGAN	PELUANG
1	Destinasi belum tertata, fasilitas minim, dan aksesibilitas terbatas	Destinasi unggulan bahari, budaya, religi, dan alam yang potensial (Anyer, Carita, Baduy, Krakatau, Ujung Kulon)
2	SDM pariwisata belum banyak yang bersertifikasi dan profesional	Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan pariwisata
3	Promosi pariwisata masih sporadis dan belum optimal memanfaatkan digital	Teknologi digital membuka peluang smart tourism, big data, dan digital marketing
4	Koordinasi lintas sektor (provinsi, kab/kota, pusat, swasta, masyarakat) belum optimal	Meningkatnya partisipasi masyarakat, tumbuhnya desa wisata, dan dukungan UMKM/swasta
5	Persaingan antar daerah dan tuntutan wisata berkelanjutan semakin tinggi	Tren ekowisata, wisata budaya, dan wisata berbasis komunitas sesuai dengan potensi lokal

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada dasarnya telah disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional, mulai dari RPJPD, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, hingga RKP Nasional. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan keselarasan arah pembangunan, khususnya dalam upaya menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

2.4.1 Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan;

Proses review dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Dinas Pariwisata Tahun 2026 dengan hasil analisa kebutuhan riil di lapangan. Langkah yang ditempuh antara lain: Menyandingkan program dan kegiatan RA RKPD dengan hasil Musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Membandingkan dengan isu strategis yang sudah dirumuskan dalam RPJMD 2025–2029, terutama terkait pariwisata bahari, wisata budaya, dan wisata alam, Menguji kesesuaian dengan data empiris: jumlah kunjungan wisatawan, kondisi infrastruktur destinasi, kebutuhan promosi digital, serta permintaan dari pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, dan melihat program/kegiatan mana yang sudah sesuai kebutuhan, mana yang target/anggarannya tidak realistis, dan mana yang belum tercantum dalam RA RKPD.

2.4.2 Penjelasan mengenai alasan proses tersebut di lakukan;

Proses review Rancangan Awal RKPD Dinas Pariwisata dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar

sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, selaras dengan arah RPJMD, serta efektif dalam penggunaan anggaran. Review juga penting untuk memperbaiki indikator agar lebih terukur, menghindari duplikasi dengan OPD lain, dan mengakomodasi masukan masyarakat serta pelaku pariwisata. Dengan demikian, program yang dihasilkan lebih tepat sasaran, berdampak, dan berkelanjutan.

2.4.3 Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Pariwisata menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, ada program dan kegiatan yang sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan, seperti peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pengembangan destinasi unggulan, namun besaran anggaran yang direncanakan masih terlalu kecil sehingga perlu penyesuaian. Kedua, terdapat kebutuhan nyata yang belum tercantum dalam rancangan awal, misalnya program pengelolaan sampah dan lingkungan di kawasan pantai serta pemberdayaan UMKM kuliner dan kerajinan di sekitar destinasi wisata. Ketiga, beberapa program yang ada perlu disesuaikan pendekatannya, contohnya kegiatan promosi yang masih berfokus pada media cetak, sementara kebutuhan saat ini lebih pada promosi digital. tabel review terhadap rancangan awal adalah:

Tabel 2.9
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Pariwisata				32.242.549.724	Dinas Pariwisata				33.508.623.488	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				32.242.549.724	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				33.508.623.488	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				32.242.549.724	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				33.508.623.488	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Pariwisata	80 Nilai	21.342.549.724	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Pariwisata	80 Nilai	23.958.623.488	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Dinas Pariwisata	80,1 Nilai	180.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	80,1 Nilai	158.200.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	35.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	20.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	20.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	35.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	25.000.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	21.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	25.000.000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	45.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	45.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi APBD pada Dinas Pariwisata	100 Persen	15.962.935.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi APBD pada Dinas Pariwisata	100 Persen	19.469.556.381	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/Bulan	15.517.500.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	18.979.556.381	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	417.435.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	460.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase BMD yang tertib pencatatan dan fisik	100 Persen	2.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase BMD yang tertib pencatatan dan fisik	100 Persen	4.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		rata-rata nilai IP ASN pada Dinas Pariwisata	71 Nilai	40.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		rata-rata nilai IP ASN pada Dinas Pariwisata	71 Nilai	33.600.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	15.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	15.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	25.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	18.600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	100 Persen	820.623.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	100 Persen	550.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	187.547.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	120.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	170.900.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	31.540.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.636.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	350.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	200.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kebutuhan BMD terpenuhi	100 Persen	1.101.367.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kebutuhan BMD terpenuhi	100 Persen	1.401.367.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	650.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	101.367.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	101.367.000	
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	150.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase terpenuhinya pelayanan penunjang kantor	100 Persen	2.600.516.724	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase terpenuhinya pelayanan penunjang kantor	100 Persen	1.683.096.107	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	421.636.084		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	419.096.107	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.178.880.640		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.264.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100 Persen	635.108.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100 Persen	658.804.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	236.523.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	241.239.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	207.389.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	207.389.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	50.200.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	60.176.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	140.996.000		Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	5,20 Persen	4.900.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	5,20 Persen	3.550.000.000	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	100 Persen	200.000.000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	100 Persen	150.000.000	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi					Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	4 Lokasi	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi					Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	1 Dokumen	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 Persen	1.000.000.000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 Persen	500.000.000	
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5 Lokasi	1.000.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Lokasi	500.000.000	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100 Persen	3.400.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100 Persen	2.700.000.000	
	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi					Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	4 Lokasi	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	4 Lokasi	100.000.000	
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi					Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	1.500.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	7 Unit	1.200.000.000	
	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi					Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	1 Dokumen	200.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	1 Dokumen	150.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	100 Orang	700.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	550 Orang	550.000.000	
	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi					Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	4 Kegiatan	800.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	4 Kegiatan	300.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4 Laporan	350.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen	300.000.000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen	200.000.000	
	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)					Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	2 Unit Usaha	150.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	2 Unit Usaha	100.000.000	
	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi					Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	150.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	100.000.000	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	5,18 Persen	3.000.000.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	5,18 Persen	3.000.000.000	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 Persen	3.000.000.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 Persen	3.000.000.000	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	1.000.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	1.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5 Dokumen	1.000.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	1.000.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	1.000.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	1.000.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	6.91 Persen	1.800.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	6.91 Persen	1.800.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100 Persen	750.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100 Persen	750.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar					Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan	200.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan	200.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	200.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	200.000.000	
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik					Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	2 Dokumen	350.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	2 Dokumen	350.000.000	
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 Persen	1.050.000.000	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 Persen	1.050.000.000	
	Pengembangan Sistem Pemasaran					Pengembangan Sistem Pemasaran					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	200.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	200.000.000	
	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah					Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen	150.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen	150.000.000	
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual					Fasilitasi Kekayaan Intelektual					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	30 Orang	300.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	50 Orang	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah					Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	200.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	200.000.000	
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah					Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen	200.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen	200.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Presentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	2.41 Persen	1.200.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Presentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	2.41 Persen	1.200.000.000	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 Persen	750.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 Persen	750.000.000	
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	80 Orang	250.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100 Orang	250.000.000	
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata					Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	80 Orang	250.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	80 Orang	250.000.000	
	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	250.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	250.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 Persen	450.000.000	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 Persen	450.000.000	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	200.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	200.000.000	
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif					Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	80 Orang	250.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	100 Orang	250.000.000	

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan daerah di sektor pariwisata selalu melibatkan partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Dari forum ini, masyarakat menyampaikan berbagai usulan program dan kegiatan yang diyakini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan, khususnya melalui pengembangan potensi pariwisata lokal dan ekonomi kreatif.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa sebagian besar usulan masyarakat terkait pariwisata berfokus pada:

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Pariwisata – mencakup perbaikan akses jalan menuju destinasi wisata, pembangunan fasilitas umum (toilet, tempat parkir, gazebo, signage), serta penataan kawasan wisata agar lebih nyaman dan aman.
2. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan – terutama wisata bahari, religi, budaya, dan ekowisata. Usulan yang muncul meliputi revitalisasi kawasan pantai, dukungan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa wisata.
3. Pemberdayaan SDM dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) – melalui pelatihan pemandu wisata, peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, serta fasilitasi promosi digital untuk produk-produk lokal.
4. Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Lokal – seperti pengembangan sentra kuliner, kriya, seni pertunjukan, dan festival budaya yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pelaku utama.
5. Promosi dan Pemasaran Wisata – melalui penyelenggaraan event lokal, festival daerah, maupun pemasaran digital untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Secara umum, usulan masyarakat tersebut telah sejalan dengan tema pembangunan daerah tahun 2026 dan arah kebijakan Dinas Pariwisata, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan wilayah, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, tidak semua usulan dapat diakomodasi sekaligus. Oleh karena itu, dilakukan prioritas dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Banten 2025–2029.
- b. Dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
- c. Nilai strategis terhadap pengembangan destinasi unggulan provinsi.
- d. Potensi sinergi dengan kabupaten/kota maupun pihak swasta/investor.

Usulan masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai masukan teknis, tetapi juga menjadi bagian integral dari perencanaan partisipatif yang memperkuat peran pariwisata sebagai sektor andalan pembangunan di Provinsi Banten.

1.5.1 Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten dilaksanakan secara partisipatif melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Usulan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja bukan hanya berasal dari internal perangkat daerah, tetapi juga merupakan hasil penjarangan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan pariwisata di Provinsi Banten.

Tahapan dimulai dari tingkat desa dan kelurahan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pada forum ini, masyarakat bersama pelaku usaha pariwisata, komunitas, serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menyampaikan gagasan dan kebutuhan yang dianggap mendesak bagi pengembangan destinasi wisata di wilayahnya, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga dukungan bagi promosi dan pengembangan ekonomi kreatif.

Usulan dari desa dan kelurahan tersebut kemudian dibahas di tingkat kecamatan untuk dilakukan klarifikasi dan prioritas. Selanjutnya, hasil Musrenbang kecamatan dibawa ke Musrenbang kabupaten/kota yang melibatkan perangkat daerah setempat. Proses ini memastikan bahwa setiap usulan telah diseleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan pariwisata di daerah masing-masing.

Pada tahap berikutnya, Dinas Pariwisata Provinsi Banten menyelenggarakan forum konsultasi publik dan forum perangkat daerah. Dalam forum ini hadir berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, asosiasi usaha pariwisata, akademisi, komunitas, hingga tokoh masyarakat. Diskusi dilakukan untuk memverifikasi kelayakan usulan, menilai kesesuaiannya dengan kewenangan pemerintah provinsi, serta mengintegrasikannya dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana strategis Dinas Pariwisata.

1.5.2 Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Usulan program dan kegiatan yang diperoleh melalui mekanisme Musrenbang serta forum pemangku kepentingan diselaraskan dengan isu-isu penting yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap usulan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga relevan dengan mandat kelembagaan dan arah pembangunan pariwisata daerah.

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama, antara lain:

1. Pengembangan Destinasi Wisata yang Berdaya Saing
Usulan masyarakat terkait peningkatan sarana prasarana pariwisata, revitalisasi kawasan wisata, dan penyediaan fasilitas penunjang sangat sejalan dengan fungsi Dinas dalam mengembangkan destinasi yang aman, nyaman, dan menarik bagi wisatawan.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata
Aspirasi berupa pelatihan pemandu wisata, penguatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata sesuai dengan fungsi Dinas dalam pembinaan dan pengembangan SDM yang profesional dan berdaya saing.
3. Promosi dan Pemasaran Pariwisata
Usulan pemangku kepentingan mengenai peningkatan promosi destinasi, penguatan branding pariwisata Banten, serta pemanfaatan teknologi digital, berkaitan langsung dengan fungsi Dinas dalam memasarkan potensi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri Pendukung Pariwisata
Kebutuhan masyarakat akan dukungan pengembangan kuliner, kerajinan, serta atraksi budaya lokal, sesuai dengan fungsi Dinas dalam mendorong sinergi pariwisata dengan sektor ekonomi kreatif.
5. Pelestarian Budaya dan Keberlanjutan Lingkungan
Usulan yang berfokus pada pengelolaan lingkungan kawasan wisata, pelestarian adat, dan penguatan event budaya merupakan bagian dari isu penting yang sejalan dengan fungsi Dinas dalam menjaga keberlanjutan pariwisata berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. berikut ini usulan dari para pemangku kepentingan:

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kabupaten Lebak			
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan luar negeri pariwisata kab/kota		Fasilitasi Event Seba Baduy dalam bentuk promosi		
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		- Video Promosi Pariwisata (Geopark Bayah Dome) - Fasilitasi Kegiatan Pameran Pariwisata Nasional - Fasilitasi Tampilan Pentas Seni		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
			- Pengembangan Kawasan Agrowisata Cikapek		
			Sarana dan Prasarana Balawista:		
			a. Seperangkat Perahu Fiber		
			b. Pos Pantau (Pantai Pulau Manuk, Darmasari, Pantai Karang Seke dan Bendungan Cikoncang)		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /	Catatan
			c. Seperangkat Alat Penyelamatan		
			d. Alat transportasi		
			Sarana Prasarana lebak Kreatif Hub (Gedung Juang \$%)		
			- Instalasi Dasar gedung Kreatif Rp. 75.000.000		
			renovasi Gedung Kreatif Rp. 715.000.000		
			-Penerbitan Sektor Digital, Foto, Video dan Coworking space Rp. 126.750.000		
			-Peralatan Seni Pertunjukan dan Film Rp 150.000.000		
			Sektor Kuliner Rp. 40.000.000		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
			Jambore Balawista Lebak		
			Jaminan Sosial/ BPJS Ketenagakerjaan		
		Kabupaten Pandeglang	Optimalisasi Taman Edukasi Sumur:		
			'- Pagar Area Taman Edukasi dan Gerbang		
			- Saung Kuliner/ Jajanan		
			- Landmark Tugu Badak		
			- Toilet		
			-Landmark Taman Edukasi Sumur		
			Perahu Wisata Island Hoping		
			Pengadaan Alat Snorkeling :		
			- Pelampung		
			- Masker		
			-googles		
			Pengadaan kapal kano explore sungai		
			Dermaga Wisata, Dermaga Apung		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokdarwis (45 Kelompok)		
			-Manajemen Keuangan kelompok		
			- Manajemen Administrasi Kelompok		
			Musyawarah anggota dan rapat pimpinan pokdarwis		
			Eksibisi Produk Potensial Likal \$ man made:		
			- Madu Hutan		
			-E-craft		
			Gula Aren dll.		
		Kabupaten Tangerang	Pelatihan dan Serifikasi Balawista		
			Pos Pantau/ Gazebo (Tiga raksa)		
			Perlengkapan dan Keselamatan Balawista		
		Kabupaten Tangerang	Pelatihan uji kompetensi Pemandu Wisata, Life Guard, PHRI, Pokdarwis, Saka Pariwisata		
			Kunjungan likasi Wisata - Famtrip		
			Gazebo Makam Keramat Ki Maslaeng		
			Sosialisasi Aplikasi Perihal Kunjungan Destinasi Wisata		
			Tugu destinasi Wisata/ Gapura (Danau Biru, Cigaru, dan Ki Maslaeng)		
			Pelatihan dan Sertifikasi balawista Kabupaten Tangerang		
			Pelatihan Uji Kompetensi:		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /	Catatan
			-Life Guard		
			-PHRI		
			Saka Pariwisata		
			- Balawista		
		Kota Tangerang	Pengembangan Wisata Air (Sungai Cisadane)		
			Pengembangan Situ Cipondoh dan Situ Gede		
			Kolaborasi dengan Angkasa Pura (Promosi Wisata)		
			Fasilitasi HAKI		
			Fasilitasi Profesi		
			Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif 40 Orang		
			Promosi Permanen di bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Merak		
		Kabupaten Lebak	Seperangkat Perahu Piber		
			Pos Pantau (Pantai Pulo manuk, Sarmasari, Pantai karang Seke, dan Bendungan Cikoncang)		
			Seperangkat Alat Penyelamatan		
			Alat Transportasi		
			Jambore Balawista Lebak		
			Jaminan Sosial/ BPJS Ketenagakerjaan		
		Balawista Banten	Sosialisasi Standar Keselamatan Wisata Tirta (alam/danau, waduk, air terjun, buatan/waterpark,)		
			Sosialisasi Balawista kepada dunia pendidikan (go to school & go to campus)		
			Pelatihm Pemandu Wisata Tirta + uniform Balawista 800 orang		
			Sertifikasi Pemandu Keselamatan Wisata Tirta 800 Orang		
			Peningkatan Kompetensi pengurus Balawista Provinsi Banten		
			Gedung Pusat krisis Pariwisata, Nilai 5 Milyar		
			Peralatan kantor: ATK 10 set, Laptop 10 Unit, printer 10 Unit		
			Perahu Karet/ Ruber boat+ Mesin Balawista 5 Unit		
			Menara Pantau Balawista 5 Unit		
			Alat Penyelamatan Board Rescue Balawista 20 unit		
			Tenda Pleton Balawista 6x14, 2 Unit		
			Kondaraan Operasional Roda dua Patroli balawista 20 unit		
			Siaga wisata Libur Natal dan tahun Baru, Libur sekolah dan Idul fitri 200 petugas		
			Tandu darat 10 unit		
			Paket alat Selam 10 Unit		
			Kendaraan Evakuasi gawat darurat Roda Empat Balawista 1 Unit		
			P3K lengkap 100 unit		
			Drone untuk pencarian+ Kamera SLR		
			Sosialisasi sadar hukum di destinasi pariwisata		
			kegiatan sosialisasi resiko tindak pidana di objek wisata		
			sosialisasi laporan tindak kriminal di pariwisata		
			sosialisai peraturan menteri pariwisata		
			gedung pusat kantor hukum balawista, Nilai 2 milyar		
			Peralatan kantor: ATK 15 set, Laptop 3 Unit, printer 3 Unit		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /	Catatan
			Kondaraan Oprasional Kantor hukum balawista roda empat 1 unit		
			Kamera SLR 1 Unit		
			Lemari 10 Unit, Meja 10 Unit, Kursi 10 Unit		
			seragam kantor hukum balawista 15 pcs		
		DPD HPI Banten	Pelantikan Pramuwisata Tingkat Madya		
			Sertifikasi Profesi Pemandu Wisata(BNSP)		
			Lisensi Pemandu Wisata		
			Gathering Pelaku Pariwisata Banten		
			Sertifikasi Traner (TOT)		
		DPD IHSA BANTEN	Pelatihan Tata Kelola Home Stay		
			Sudy Banding tentang Home Stay		
			Pelatihan Tata Cara membuat Izin Home Stay		
			Lomba Home Stay Tingkat Provinsi Banten		
			Uji Kompetensi Bagi Pekerja Home Stay		
			Uji Kompetensi SKKNI Usaha Home Stay		
			Uji Kompetensi Juru Masak Home Stay		
			Uji Kompetensi Petugas resepsionis di Homestay		
			Bantuan Fasilitas Peralatan Homstay		
		ASPERAPI	Pelatihan Konten Kreator		
			Fasilitasi Sosialisasi Usaha Pameran, Konveksi dan Eksebis		
		UKAMI BANTEN/Koperasi UKAMI	Support Infrastruktur Kegiatan		
			Tarian Budaya banten		
			Media Untuk Sosialisasi Event		
			Kantor Untuk Organisasi		
			Fasilitasi Pameran		
			Fasilitasi Pendidikan UMKM terkait Digital		
			Wise Galery Banten (We are Indonesian Smart Enterpreneur)		
			Penyiapan Infrastruktur dan kelengkapan interior galery/toko		
			Brosur, Banner dll		
			Fasilitasi pelatihan:		
			-Desain		
			-Fashion		
			-Craft		
			-Packaging		
			-dan fasilitasi Haki		
			Dukungan dari Dispar dalam Peresmian Galery dan Pembukaan WISE galery		
		Kota Serang	EKRAFEST (Kolaborasi event 17 sub sektor)		
			Subsidi Sertifikasi BNSP:		
			-Pendamping UMKM		
			- Digital Marketing		
			Smartphone Photography (Foto Produk UMKM)		
			Pelatihan Desain Grafis dan Edit Video Produk UMKM		
			Lomba E-Sport Kota Serang		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /	Catatan
			Wejangan Seni Budaya (Kopdar Pelaku Seni Budaya)		
			Workshop tiktok Seller & affiliate		
			Workshop Barista Coffee		
			Penyuluhan Wira Usaha baru di tiap kecamatan		
			Pameran Foto Banten		
			Banten Product festival		
		Kabupaten Serang	Pelatihan Ekonomi Kreatif untuk Desa Wisata		
			fasilitasi Permodalan tindak lanjut dari pelatihan		
			Pembangunan Sarana Pelatihan Ekonomi Kreatif		
			Fasilitasi Pembiayaan HAKI		
		Genpi Banten	Sailing Geopark		
			Banten Digital Turism Campaign		
			Walking Tour		
			Banten tourism boatcamp		
			Festival Kuliner		
			Ekowisata & Green Tourism Movement		
			Lomba Digital, Aplikasi, web layaana wisata		
			Lomba foto dan video		
			dukungan alat produksi konten		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta bagian dari sistem perencanaan Pembangunan Provinsi Banten. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJM Nasional Tahun 2025 - 2029, RKP Nasional Tahun 2026; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJMD Provinsi Banten 2025–2029 dan RKPD Provinsi Banten 2026.

Dalam kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN Nasional Tahun 2025-2029, Urusan Kewenangan yang terdapat pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten yaitu Urusan Pilihan Bidang Pariwisata. Urusan Pilihan Pariwisata berada dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat (Prioritas Lainnya) melalui Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pariwisata dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, fungsi Dinas Pariwisata berada kedalam Urusan Pilihan Bukan Pelayanan Dasar, memiliki 5 (lima) Program yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Pemasaran Pariwisata
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

3.1.1 Arah Kebijakan Kementerian Pariwisata

Dalam rangka perwujudan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Arah Kebijakan menyatakan bahwa arah kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Untuk itu

dibentuklah arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan/ sasaran strategis Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029. Arah kebijakan Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 terbagi menjadi lima ruang lingkup utama yaitu:

1. Pengembangan Produk Pariwisata yang adaptif, sinergis, dan berkualitas
2. Pengembangan SDM Pariwisata yang unggul dan berdaya saing
3. Pengembangan pariwisata yang menjunjung keberlanjutan dan keadilan sosial
4. Kolaborasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan pariwisata
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kementerian Pariwisata yang baik dan bersih

Dalam periode 2025-2029, Kementerian Pariwisata memiliki lima arah kebijakan utama yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia. Setiap arah kebijakan diiringi dengan strategi spesifik, melibatkan unit pelaksana, serta relevansi terhadap sasaran strategis dan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Unit pelaksana utama di dalam Kementerian Pariwisata bertanggung jawab untuk menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan searah dengan arah kebijakan sehingga dapat mencapai sasaran strategis kementerian. Setiap arah kebijakan mengedepankan kolaborasi intraorganisasional di dalam internal Kementerian Pariwisata maupun dengan lintas Kementerian/Lembaga terkait. Arah kebijakan Kementerian Pariwisata juga mendorong kolaborasi intra-organisasional dengan organisasi lainnya baik sektor privat, lembaga non profit, perguruan tinggi dan masyarakat. Berikut penjelasan detail lima arah kebijakan Kementerian Pariwisata 2025-2029:

Tabel 3.1
Tabel Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata

Arah Kebijakan	Strategi Kementerian
Pengembangan Produk Pariwisata yang adaptif, sinergis, dan berkualitas	- Penyusunan kajian dan kebijakan yang mendorong pengembangan produk pariwisata
	- Standarisasi destinasi sesuai standar nasional dan internasional untuk memenuhi destinasi yang atraktif, berkualitas, dan, berkelanjutan dan mengadopsi perkembangan teknologi
	- Mendorong standarisasi dan sertifikasi usaha
	- Prioritas pemasaran berbasis digital terutama untuk 14 destinasi prioritas nasional
	- Diversifikasi produk pariwisata

Arah Kebijakan	Strategi Kementerian
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas penyelenggaraan event dan MICE
Pengembangan SDM Pariwisata yang unggul dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata melalui pelatihan vokasi dan meningkatkan peran Poltekpar dalam mengembangkan SDM Pariwisata serta pengembangan standar dan perangkat uji kompetensi
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi digital pelaku pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku pariwisata
<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pariwisata yang menjunjung keberlanjutan dan keadilan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan produk pariwisata dengan menjaga kelestarian alam dan nilai-nilai sosial budaya - Peningkatan pengembangan produk pariwisata berbasis konservasi lingkungan, menjaga kearifan lokal, memperkenalkan warisan budaya, ilmu pengetahuan/dan atau teknol - Pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh kelompok usia dari berbagai gender, ras, agama, etnis, dan usia untuk ikut terlibat sebagai pelaku pariwisata dalam kompetisi yang sehat - Pengembangan sektor pariwisata berbasis risiko/ketahanan dalam menghadapi potensi bencana
Kolaborasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan Masyarakat Lokal dalam mendukung produktivitas pariwisata - Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengelolaan destinasi pariwisata yang unggul
	Kemitraan strategis dalam pemasaran baik pada level nasional dan internasional
	Kerjasama dengan perguruan tinggi/universitas/lembaga riset dan institusi pendidikan untuk melakukan riset pengembangan produk pariwisata
Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kementerian Pariwisata yang baik dan bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Adopsi teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisiensi dan meningkatkan capaian indeks SPBE - Peningkatan standar kualitas pelayanan - Pembangunan budaya kinerja, budaya risiko, dan budaya inovasi - Pembangunan model tata kelola platform dalam pelaksanaan tugas

Keterangan: Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2025 – 2029

3.1.1.1 Target Kinerja

Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk kontribusi dalam memperkuat transformasi ekonomi Indonesia. Transformasi ekonomi tersebut melalui pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk menjadikan Indonesia sebagai Destinasi Unggulan Dunia yang Berkelanjutan dan Bernilai Tambah yang Tinggi. Sehubungan dengan komitmen dan tujuan tersebut, terdapat tujuh indikator sebagai penyumbang data makro untuk target kinerja Kementerian Pariwisata yang tercantum pada Renstra 2024 - 2029. Matriks kinerja dari Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan (SK) :

Tabel 3.2
Target Kinerja Kementerian Pariwisata

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target RKP 2025	Target 2029
SS1 Meningkatnya kapabilitas sistem kepariwisataan	Indeks Pembangunan Pariwisata (Peringkat <i>Travel and Tourism Development Index</i>)	Peringkat	22	22	20
	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Juta Orang	25,14	25,75	29
	Rasio PDB Pariwisata	Persentase	4.4	4.6	5
SS2 Meningkatnya kualitas pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara	Juta Kunjungan	10,37 (tw 3)	17	20,00-23,59
	Jumlah Perjalanan wisatawan nusantara	Juta Kunjungan	83,36 (tw 3)	1.084,00	1.500,00
	Devisa Pariwisata	Miliar USD	7,46	22	32-39.44
SS3 Meningkatnya kualitas governansi kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A	A	A

Keterangan: Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2025 – 2029

3.1.2 Renstra Kementerian Ekonomi Kreatif

3.1.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenekraf/Bekraf

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Arah Kebijakan menyatakan bahwa arah kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas

Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Untuk itu dibentuklah arah kebijakan dan strategi Kemenekraf/Bekreaf tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan/ sasaran strategis Kemenekraf/Bekreaf tahun 2025-2029. Arah kebijakan Kemenekraf/Bekreaf tahun 2025-2029 terbagi menjadi 4 (empat) ruang lingkup utama yaitu:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan, Strategi, Program, dan Lini Masa Kemenekraf/Bekraf
Periode 2025-2029

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program Flagship
1	Kolaborasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan governansi kolaboratif multilevel dan multisektor	Advokasi untuk pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif di Pemerintah Daerah dan peningkatan sub-urusan ekonomi kreatif menjadi urusan pemerintahan
			Pengarusutamaan ekonomi kreatif melalui co-creation secara nasional, regional, dan global (a.l. WCCE, G-CINC)
			Penyusunan Grand Design Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
			Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
			Penyusunan Peta Jalan Ekonomi Kreatif Indonesia
			Revisi Peraturan Presiden tentang Gim
			Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
			Ekonomi Kreatif
		Peningkatan tata kelola dan manajemen data ekonomi kreatif untuk pengambilan keputusan	Outlook Ekonomi Kreatif
			Penguatan data governance dan data management sektoral ekonomi kreatif bekerja sama dengan BPS dan Pemerintah Daerah
			Survei Nasional Ekonomi Kreatif
			Penyiapan data Profile Pelaku Ekonomi Kreatif
2	Penciptaan	Pembekalan	Pengembangan talenta ekraf

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program Flagship
	lapangan kerja dan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	kompetensi, alih kompetensi, dan peningkatan kompetensi kerja talenta ekonomi kreatif	Pengembangan talenta digital
			Inkubasi pengembangan subsektor ekraf
			Inkubasi produk kreatif berbasis riset dan berdaya saing
		Peningkatan pembiayaan	Fasilitasi akses pembiayaan pada subsektor ekraf prioritas
			Pekan pembiayaan ekraf
		Penguatan manajemen kekayaan intelektual ekonomi kreatif	Sosialisasi dan pendampingan HKI
			Kelas KI
			Komersialisasi HKI
		Pelindungan dan peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif	Pelindungan pekerja ekraf
			Peningkatan kesejahteraan pekerja ekraf
3	Pengembangan ekonomi kreatif yang memperkuat Asta Cita dan inklusivitas	Pemberian insentif bagi pelaku ekonomi kreatif	Program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Prospek)
			Bantuan insentif pemerintah untuk peningkatan produktivitas ekonomi kreatif
			Bantuan pemerintah sarana dan prasarana
			Bioskop alternatif
			AYO HARGAI (Bantuan untuk Gim Nasional onboarding di platform distribusi gim)
		Peningkatan inovasi dan kolaborasi	Aktivasi Rumah Kreatif (creative hub) dalam mendorong kreasi
			Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (AKSI)
		pengembangan ekonomi kreatif	Business Matching Pelaku Kreatif
			Pengembangan Open Innovation Platform
			Kolaborasi dengan institusi pendidikan dalam pengembangan produk kreatif digital
		Peningkatan pemasaran dan penguatan rantai nilai dan rantai pasok ekonomi kreatif	Penyusunan strategi pemasaran ekspor
			Penyusunan strategi pemasaran dalam negeri
			Startup Scale Up Champion
			Indonesia Wastra Day
			Indonesian International IP Festival
			Penyelenggaraan pameran internasional ekonomi kreatif
			Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program Flagship
			Visual Branding Kreatif Indonesia
4	Penguatan tata kelola pemerintahan Kemenekraf/Bekraf yang baik dan bersih	Penguatan citra positif	Peningkatan manajemen pelayanan publik
		Kemenekraf/Bekraf	Visual branding baru Kemenekraf/Bekraf
		Transformasi digital	Penyusunan dan pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE
		Kemenekraf/Bekraf	Penguatan manajemen pengetahuan berbasis big data sebagai strategi institutional information-based system
		Peningkatan kapasitas talenta dan meritokrasi Kemenekraf/Bekraf	Pembangunan dan pelaksanaan manajemen talenta
			Pembangunan dan pengembangan pembelajaran terintegrasi melalui corporate university
Penguatan tata kelola yang baik dan modern	Pembangunan budaya kinerja, budaya risiko, dan budaya inovasi di lingkungan Kemenekraf/Baparekraf		
	Pembangunan model tata kelola platform kolaboratif dalam pelaksanaan tugas		

Keterangan: Renstra Kementerian Ekonomi Kreatif Tahun 2025 – 2029

3.1.2.2 Target Kinerja

Kemenekraf/Bekraf diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, terkhusus dalam Renstra 2025-2029 ini terdapat enam indikator sebagai penyumbang data makro untuk target kinerja Kemenekraf/Bekraf. Adapun, Sasaran Strategis, Indikator serta Target yang diharapkan dapat dicapai Kemenekraf/Bekraf dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target Kinerja Kemenekraf/Bekraf 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2029
Sasaran Strategis 1: Menguatnya kapasitas enabling factors ekosistem ekonomi kreatif					
IKSS 1.1	Persentase progres pencapaian rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional	%	n/a		
IKSS 1.2	Pertumbuhan investasi ekonomi kreatif	%	n/a	7,3	8,08

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2029
IKSS 1.3	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	Juta orang	22,74	25,15	27,66
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional					
IKSS 2.1	Pertumbuhan kekayaan intelektual ekonomi kreatif yang dikomersialisasikan	%	n/a	2030	40
IKSS 2.2	Pertumbuhan ekspor ekonomi kreatif	%	n/a	5,15	5,96
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas governansi, kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur Kemene kraf/Bekraf					
IKSS 3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kemene kraf/Bekraf	Kategori	A	A	A

Keterangan: Renstra Kementerian Ekonomi Kreatif Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan sumberdata (metadata) dan produk hukum kementerian pariwisata dan kementerian ekonomi kreatif republik indonesia, merilis renstra yaitu renstra kementerian pariwisata dan renstra kementerian ekonomi kreatif Republik Indonesia periode Tahun 2025-2029;

Faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pariwisata dan ekonomi kreatif sangat penting untuk dianalisis agar sektor ini dapat berkembang dengan optimal. Berikut adalah beberapa faktor tersebut:

Tabel 3.5
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Terhadap Renstra Kementerian/ Lembaga

Tujuan	Permasalahan Pelayanan SKPD*)	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas & kuantitas Destinasi Pariwisata	Belum Optimalnya Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	obyek wisata yang kurang/tidak memiliki daya tarik/unik dari obyek wisata di daerah lain.	kebijakan dan fasilitasi peningkatan nilai tambah destinasi dengan amenities, fasilitas, dan atraksi yang aksesable
		obyek wisata yang menarik dan unik umumnya memiliki skala jangkauan yang kecil.	kebijakan dan fasilitasi peningkatan keragaman daya tarik melalui atraksi atau rekayasa kebijakan yang aksesable

Tujuan	Permasalahan Pelayanan SKPD*)	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
		daya saing dan nilai obyek wisata yang lemah	kebijakan dan fasilitasi keterlibatan investasi, UMKMK, BUMD, PMDN, dan PMA, dan atau KPS
		pengelola destinasi yang belum profesional	kebijakan dan fasilitasi keterlibatan investasi, UMKMK, BUMD, PMDN, dan PMA, dan atau KPS
		belum lengkapnya fasilitas dan amenities yang ada di daerah destinasi wisata	kebijakan dan fasilitasi penyediaan amenities dan fasilitas di kawasan destinasi
		kurang optimalnya ketersediaan dan kelayakan fasilitas aksesibilitas menuju destinasi wisata	kebijakan dan fasilitasi penyediaan amenities dan fasilitas di kawasan destinasi
		ketidakefektifan berbagai regulasi yang menghambat pengembangan destinasi dengan dasar pembagian kewenangan atas urusan dan anggaran	kebijakan dan fasilitas usulan yang bottom up dan lintas sektor untuk mengeliminasi masalah pembagian urusan dan anggaran
Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, dan	Belum Optimalnya Promosi Pariwisata yang menarik Wisatawan	Pemasaran dan atau promosi pariwisata yang diikuti skala internasional, nasional, regional, dan lokal lebih bersifat temporer, bukan bersifat	kebijakan dan fasilitasi sistem promosi dan pemasaran yang menyeluruh,

Tujuan	Permasalahan Pelayanan SKPD*)	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif & interaktif efisien,		sistemik	
		keterbatasan materi pemasaran dan promosi pariwisata yang belum tepat sasaran	kebijakan dan fasilitasi materi promosi melalui KKL yang bersifat vertikal dan horizotal dengan pelibatan para pihak terkait
		Keterbatasan media pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif	kebijakan dan fasilitasi seleksi media yang efektif dan efisien
		keterbatasan informasi sasaran dan target pemasaran	kebijakan dan fasilitasi materi promosi dan media promosi melalui pelibatan para pihak terkait yang bersifat vertikal dan horizotal.
Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional	Minimnya Sarana dan Prasarana peningkatan produk ekonomi kreatif	belum tersedianya roadmap ekonomi kreatif banten yang detail sebagai pemicu kreatifitas publik	kebijakan dan fasilitasi pembangunan roadmap ekonomi kreatif banten yang komprehensif, komunikatif, dan bertanggung jawab
		belum kompetitifnya dunia usaha ekonomi kreatif karena kelemahan data, informasi, dan publikasi	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya motif ekonomis dan aktivitas kompetisi melalui berbagai forum secara proposional
		belum tersedianya lembaga yang mampu memfasilitasi perkembangan	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya lembaga yang mampu

Tujuan	Permasalahan Pelayanan SKPD*)	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
		kemajuan ekonomi kreatif	memfasilitasi perkembangan ekonomi kreatif
		belum optimalnya partisipasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam upaya peningkatan daya saing seperti sertifikasi	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya event yang bersifat lomba dan kompetisi
Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif efisien	Terbatasnya SDM Pariwisata dan Ekraf yang bersertifikat	belum adanya arah kebijakan pengembangan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang partisipatif dan komunikatif sebagai pengembangan potensi masyarakat, khususnya di sekitar destinasi	kebijakan dan fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang partisipatif dan komunikatif
		homogenitas masyarakat di kawasan destinasi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lambat	kebijakan dan fasilitasi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial sebagai entry point pengembangan sumberdaya manusia

Keterangan : Dinas Pariwisata Banten tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan Pariwisata dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2025-2029, diarahkan untuk pencapaian Misi ke-2 yaitu;

- a. MISI 2 : MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL**

Daerah : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif

Perangkat Daerah : Penguatan 6A (atraksi, amenitas, aksesibilitas, aktivitas, ancillary, dan available package) pada destinasi unggulan provinsi melalui penguatan regulasi, Pengembangan kawasan pariwisata provinsi yang berkelanjutan berbasis Kearifan dan sumber daya lokal, Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif

b. MISI 4 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG ADAPTIF DAN BERINTEGRITAS

Daerah : Meningkatnya Pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada Masyarakat

Perangkat Daerah : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Pariwisata.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan Perangkat Daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.6

Keterkaitan Misi dalam RPJMD dengan Renstra Dinas Pariwisata

VISI : BANTEN MAJU, ADIL, MERATA, TIDAK KORUPSI			
MISI 2 : Mendorong Kemajuan Ekonomi secara Inklusif melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan kunjungan wisatawan Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Kreatif	Penguatan 6A (atraksi, amenitas, aksesibilitas, aktivitas, ancillary, dan available package) pada destinasi unggulan provinsi melalui penguatan regulasi. Pengembangan kawasan pariwisata provinsi yang berkelanjutan berbasis Kearifan dan sumber daya lokal. Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif Peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa melalui Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Berintegritas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Pariwisata	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan

Berdasarkan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk “**Mendorong Kemajuan Ekonomi secara Inklusif melalui Penguatan Sektor Kreatif,**

Unggulan, dan Potensial” di tahun 2026, tujuan yang akan dicapai Dinas Pariwisata adalah Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui strategi Meningkatkan kunjungan wisatawan dan Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Kreatif dengan arah kebijakan (1) Penguatan 6A (atraksi, amenitas, aksesibilitas, aktivitas, ancillary, dan available package) pada destinasi unggulan provinsi melalui penguatan regulasi, (2) Pengembangan kawasan pariwisata provinsi yang berkelanjutan berbasis Kearifan dan sumber daya local, (3) Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif (4) Peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sedangkan untuk **“Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa melalui Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Berintegritas”** di tahun 2026, tujuan yang akan dicapai Dinas Pariwisata adalah **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Dinas Pariwisata”** dengan sasaran **“Meningkatkan implementasi reformasi Birokrasi di Dinas Pariwisata”**, upaya tersebut akan diwujudkan melalui strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Pariwisata dengan arah kebijakan Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan.

Arah Kebijakan Tahunan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata per tahunnya.

Tabel 3.7
Arah Kebijakan Tahunan Dinas Pariwisata

No	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Penguatan 6A (atraksi, amenitas, aksesibilitas, aktivitas, ancillary, dan available package) pada destinasi unggulan provinsi melalui penguatan regulasi. 2. Pengembangan kawasan pariwisata provinsi yang berkelanjutan berbasis Kearifan dan sumber daya lokal.	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata
		2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
		1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata
		2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi	2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi	2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi	2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi	2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi

No	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
2	Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif	1. Peningkatan kualitas ekosistem kreatif	1. Peningkatan kualitas ekosistem kreatif 2. Pembangunan Pusat Ruang Kreatif	1. Peningkatan kualitas ekosistem kreatif	1. Peningkatan kualitas ekosistem kreatif	1. Peningkatan kualitas ekosistem kreatif
3	Peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf
		2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf	2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf	2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf	2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf	2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf
4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RECANA KERJA DINAS PARIWISATA

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah
- c. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi
- d. Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 adalah:

- a. Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- d. Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 3.8
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	TARGET 2026
1	2	3	4	5
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi di Provinsi Banten	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Indeks	80
Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	16.310
		Nilai PDRB Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	74.560

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan, Dinas Pariwisata Provinsi Banten senantiasa memperhatikan berbagai faktor strategis yang menjadi dasar pertimbangan. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dirumuskan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten:

1. Perumusan program mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga Renstra Dinas Pariwisata. Kesesuaian ini penting untuk memastikan konsistensi antara kebijakan jangka panjang, menengah, dan tahunan sehingga program yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian visi daerah secara terarah.
2. Isu strategis dan permasalahan aktual di sektor pariwisata menjadi landasan penting dalam menentukan prioritas kegiatan. Misalnya, keterbatasan infrastruktur penunjang wisata, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurang optimalnya promosi, serta tantangan keberlanjutan lingkungan. Faktor-faktor tersebut dipetakan agar program yang dirumuskan dapat menjadi solusi nyata bagi

- permasalahan daerah sekaligus berkontribusi pada misi pembangunan yang dicanangkan kepala daerah.
3. Aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan pariwisata yang diperoleh melalui Musrenbang dan forum perangkat daerah juga menjadi masukan penting. Dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, komunitas pariwisata, dan kelompok sadar wisata, program yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung terhadap kesejahteraan rakyat, sesuai dengan visi pembangunan Banten yang inklusif.
 4. Faktor kewenangan pemerintah provinsi turut menjadi pertimbangan. Tidak semua usulan dapat diakomodasi apabila berada di luar kewenangan provinsi. Oleh karena itu, program yang dirumuskan harus sesuai dengan regulasi dan pembagian urusan pemerintahan, sehingga pelaksanaannya efektif serta tidak tumpang tindih dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
 5. Aspek ketersediaan anggaran dan kapasitas fiskal daerah menjadi acuan penting dalam menentukan skala prioritas. Program yang diusulkan harus realistis, dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah pusat, sektor swasta, maupun mitra pembangunan lain.
 6. Potensi dan keunggulan pariwisata Banten juga menjadi bahan pertimbangan utama. Provinsi Banten memiliki kekayaan wisata bahari, budaya, religi, dan ekowisata yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik unggulan. Program dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat potensi tersebut agar dapat meningkatkan daya saing pariwisata Banten di tingkat nasional maupun internasional, sejalan dengan misi meningkatkan daya saing daerah.

Faktor keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya turut menjadi perhatian dalam perumusan program. Dinas Pariwisata memastikan bahwa pengembangan destinasi wisata tidak merusak ekosistem dan tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas daerah. Hal ini mendukung visi pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan faktor sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan regional juga dipertimbangkan. Program pariwisata Banten harus mendukung agenda prioritas nasional, seperti pengembangan destinasi wisata prioritas, promosi pariwisata berbasis digital, serta pemulihan pariwisata pasca-pandemi. Dengan demikian, arah kebijakan daerah tidak hanya selaras dengan misi kepala daerah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan pariwisata nasional.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Banten dirumuskan secara komprehensif, terukur, dan terintegrasi. Seluruhnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yaitu membangun pariwisata yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

3.3.2.1 Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Program adalah penjabaran Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi masing-masing. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Program yang digunakan pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata tahun 2025-2029 sebanyak lima program, yaitu:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dari 5 (lima) program diatas kemudian dijabarkan menjadi 17 (tujuh belas) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) subkegiatan yang menunjang indikator kinerja utama. Program, Kegiatan, Subkegiatan.

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang dihadapi. Program kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Banten mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi, RPJMD Provinsi Banten tahun 2025-2029, Rencana Strategis Dinas Pariwisata tahun 2025-2029:

Urusan pilihan bidang pariwisata merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah yang mencakup peningkatan daya saing destinasi pariwisata, perluasan jangkauan pemasaran pariwisata, penguatan ekosistem ekonomi kreatif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fokus Program Kegiatan Tahun 2026 Dinas Pariwisata Provinsi Banten menetapkan fokus program kegiatan Tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata yang optimal, melalui lima strategi utama:

1. Penataan dan pengelolaan destinasi pariwisata melalui meningkatkan sarana dan prasarana destinasi wisata dan memperkuat kapasitas manajerial pengelola destinasi pariwisata,

terutama destinasi unggulan hasil usulan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif dengan mengembangkan tiga sub-sektor unggulan ekonomi kreatif: Kriya, Fashion, dan Kuliner, sebagai pendorong pertumbuhan usaha jasa pariwisata.
3. Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kapasitas kerja bagi SDM pariwisata yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif lokal.
4. Penguatan Kolaborasi dengan Stakeholder dengan melaksanakan pertemuan, forum diskusi, dan kerja sama lintas sektor bersama pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Peningkatan Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, media sosial, dan platform online untuk memperluas jangkauan promosi.

Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Makro Provinsi Banten 2025–2029
Seluruh kegiatan di atas diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja makro Provinsi Banten, khususnya dalam hal:

- a. Pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata,
- b. Peningkatan kontribusi sektor ekonomi kreatif,
- c. Pengurangan tingkat pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,
- d. Peningkatan indeks daya saing daerah dan kualitas SDM.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026, Dinas Pariwisata Provinsi Banten menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis sebagai berikut:

Tabel 3.9

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
	Dinas Pariwisata			36.835.367.000				32.068.884.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			36.835.367.000				32.068.884.000	
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		36.835.367.000				32.068.884.000	
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Pariwisata	80			83	23.709.033.000
3	26	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	80,1		80,3	163.000.000
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	20.000.000
3	26	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	7.000.000
3	26	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	7.000.000
3	26	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	7.000.000
3	26	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	7.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Laporan 20.000.000	
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan 25.000.000	
3	26	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah							
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Data 25.000.000	
3	26	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	45.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Berita Acara 45.000.000	
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi APBD pada Dinas Pariwisata	100 Persen	15.438.109.000			100 Persen 19.754.250.000	
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	14.955.209.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75 Orang/ Bulan 19.264.250.000	
3	26	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	440.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen 460.000.000	
3	26	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	17.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	5.000.000
3	26	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	5.000.000
3	26	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	5.000.000
3	26	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	5.000.000
3	26	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18 Laporan	5.000.000
3	26	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	5.000.000
3	26	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD yang tertib pencatatan dan fisik	100 Persen	1.000.000			100 Persen	4.000.000
3	26	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	4.000.000
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	rata-rata nilai IP ASN pada Dinas Pariwisata	71 Nilai	22.050.000			71 Nilai	55.000.000
3	26	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Orang	15.000.000
3	26	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	14.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	40.000.000
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	100 Persen	576.905.000			100 Persen	600.000.000
3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	10.000.000
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	132.530.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Paket	120.000.000
3	26	01	1.06	0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	164.375.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	200.000.000
3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	20.000.000
3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	40.000.000
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	200.000.000
3	26	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	5.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
3	26	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen 5.000.000	
3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan BMD terpenuhi	100 Persen	840.000.000			100 Persen 757.783.000	
3	26	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit				1 Unit 350.000.000	
3	26	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit				3 Unit 100.000.000	
3	26	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket				1 Paket 50.000.000	
3	26	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	240.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit 57.783.000	
3	26	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
3	26	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit				1 Unit 200.000.000	
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pelayanan penunjang kantor	100 Persen	1.576.400.000			100 Persen 1.715.000.000	
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	374.524.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan 450.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.201.875.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan 1.265.000.000	
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 Persen	1.068.804.000			100 Persen 660.000.000	
3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	241.239.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Unit 250.000.000	
3	26	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	207.389.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 Unit 210.000.000	
3	26	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	60.176.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		76 Unit 100.000.000	
3	26	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	560.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit 100.000.000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	5,20 Persen	11.281.783.000			5,40 Persen 4.253.655.000	
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	100 Persen	150.000.000			100 Persen 300.000.000	
3	26	02	1.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi							
						Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	4 Lokasi	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Lokasi 200.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
3	26	02	1.01	0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen 100.000.000	
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 Persen	459.500.000			100 Persen 1.100.000.000	
3	26	02	1.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi							
						Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Lokasi	459.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Lokasi 1.100.000.000	
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100 Persen	10.552.283.000			100 Persen 2.403.655.000	
3	26	02	1.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi							
						Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	4 Lokasi	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Lokasi 200.000.000	
3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen 100.000.000	
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	9 Unit	8.870.466.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit 900.000.000	
3	26	02	1.03	0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi							
						Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	1 Dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen 300.000.000	
3	26	02	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	375 Orang	461.817.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	203.655.000
3	26	02	1.03	0011		Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi						
						Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	4 Kegiatan	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Kegiatan	300.000.000
3	26	02	1.03	0012		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4 Laporan	570.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	400.000.000
3	26	02	1.04			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen	120.000.000			100 Persen	450.000.000
3	26	02	1.04	0009		Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)						
						Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	2 Unit Usaha	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit Usaha	250.000.000
3	26	02	1.04	0010		Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi						
						Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	200.000.000
3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5,18 Persen	2.132.582.000			6,21 Persen	1.985.039.000
3	26	03	1.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 Persen	2.132.582.000			100 Persen	1.985.039.000
3	26	03	1.01	0001		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	3 Dokumen	386.402.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	600.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
						Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						
3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata							
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	750.000.000
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri							
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	1.396.180.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Kegiatan	635.039.000
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	6.91 Persen	1.990.000.000			8,06 Persen	1.213.710.000
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100 Persen	1.300.000.000			100 Persen	513.710.000
3	26	04	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar							
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	163.710.000
3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula							
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	150.000.000
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik							
						Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan	2 Dokumen	1.100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	200.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
						Pasar Domestik						
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 Persen	690.000.000			100 Persen	700.000.000
3	26	04	1.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	150.000.000
3	26	04	1.02	0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah							
						Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	150.000.000
3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual							
						Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	50 Orang	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Orang	150.000.000
3	26	04	1.02	0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah							
						Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Lembaga	100.000.000
3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah							
						Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	150.000.000
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	2,41 Persen	1.767.534.000			2,76 Persen	907.447.000
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 Persen	1.367.534.000			100 Persen	607.447.000
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	100 Orang	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah		50 Orang	150.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)
						bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			(PAD)			
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata							
						Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	1050 Orang	700.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Orang	207.447.000
3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif							
						Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	367.534.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	250.000.000
3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 Persen	400.000.000			100 Persen	300.000.000
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif							
						Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80 Orang	150.000.000
3	26	05	1.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif							
						Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	100 Orang	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80 Orang	150.000.000
J U M L A H								36.835.367.000				32.068.884.000

Tabel 3.10
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA 2025 (Rp)	Finalisasi RENJA 2026 (Rp)	RENJA 2026 (Rp)	SELISIH
1					2	3	4	5	6
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	48.085.573.000	31.283.992.000	36.835.367.000	-16.801.581.000
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.328.500.000	21.212.093.000	19.663.468.000	1.883.593.000
3	26	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242.488.000	140.200.000	140.200.000	-102.288.000
3	26	1	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.564.000	15.200.000	15.200.000	-67.364.000
3	26	1	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.000.000	7.000.000	7.000.000	-6.000.000
3	26	1	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.000.000	7.000.000	7.000.000	-2.000.000
3	26	1	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
3	26	1	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
3	26	1	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.240.000	12.000.000	12.000.000	-6.240.000
3	26	1	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.128.000	15.000.000	15.000.000	-30.128.000
3	26	1	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	16.000.000	25.000.000	25.000.000	9.000.000
3	26	1	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.556.000	45.000.000	45.000.000	444.000
3	26	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.192.000.000	16.886.734.000	15.438.109.000	1.694.734.000

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA 2025 (Rp)	Finalisasi RENJA 2026 (Rp)	RENJA 2026 (Rp)	SELISIH
3	26	1	1.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.581.200.000	16.403.834.000	14.955.209.000	1.822.634.000
3	26	1	1.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	562.800.000	440.900.000	440.900.000	-121.900.000
3	26	1	1.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000	17.000.000	17.000.000	-8.000.000
3	26	1	1.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
3	26	1	1.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000
3	26	1	1.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
3	26	1	1.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
3	26	1	1.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
3	26	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000
3	26	1	1.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000			-500.000
3	26	1	1.03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000			-500.000
3	26	1	1.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000			-500.000
3	26	1	1.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
3	26	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.500.000	26.100.000	22.050.000	7.600.000
3	26	1	1.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000			-500.000
3	26	1	1.05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	500.000			-500.000

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA 2025 (Rp)	Finalisasi RENJA 2026 (Rp)	RENJA 2026 (Rp)	SELISIH
3	26	1	1.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	500.000			-500.000
3	26	1	1.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
3	26	1	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9.500.000	18.600.000	14.550.000	9.100.000
3	26	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	482.744.000	550.000.000	576.905.000	67.256.000
3	26	1	1.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.634.000	10.000.000	10.000.000	366.000
3	26	1	1.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	120.000.000	132.530.000	-80.000.000
3	26	1	1.06	003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		150.000.000	164.375.000	150.000.000
3	26	1	1.06	004	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000
3	26	1	1.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0
3	26	1	1.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.850.000			-10.850.000
3	26	1	1.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.260.000	200.000.000	200.000.000	-2.260.000
3	26	1	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
3	26	1	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
3	26	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	168.263.600	840.000.000	840.000.000	671.736.400
3	26	1	1.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0
3	26	1	1.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0
3	26	1	1.07	005	Pengadaan Mebel				0
3	26	1	1.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.263.600	240.000.000	240.000.000	71.736.400

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA 2025 (Rp)	Finalisasi RENJA 2026 (Rp)	RENJA 2026 (Rp)	SELISIH
3	26	1	1.07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		600.000.000	600.000.000	600.000.000
3	26	1	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0
3	26	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.587.396.400	1.599.255.000	1.576.400.000	-988.141.400
3	26	1	1.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.515.760	373.223.840	374.524.720	-35.291.920
3	26	1	1.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.178.880.640	1.226.031.160	1.201.875.280	-952.849.480
3	26	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.108.000	1.168.804.000	1.068.804.000	533.696.000
3	26	1	1.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.523.000	241.239.000	241.239.000	4.716.000
3	26	1	1.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.389.000	207.389.000	207.389.000	0
3	26	1	1.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.200.000	60.176.000	60.176.000	9.976.000
3	26	1	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.996.000	660.000.000	560.000.000	519.004.000
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	17.550.000.000	4.107.500.000	11.281.783.000	-13.442.500.000
3	26	2	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	6.100.000.000	150.000.000	150.000.000	-5.950.000.000
3	26	2	1.01	001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		100.000.000	100.000.000	100.000.000
3	26	2	1.01	006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi		50.000.000	50.000.000	50.000.000

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA 2025 (Rp)	Finalisasi RENJA 2026 (Rp)	RENJA 2026 (Rp)	SELISIH
3	26	2	1.01	005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	6.100.000.000			-6.100.000.000
3	26	2	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	7.650.000.000	459.500.000	459.500.000	-7.190.500.000
3	26	2	1.02	002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	460.000.000			-460.000.000
3	26	2	1.02	004	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.115.000.000			-2.115.000.000
3	26	2	1.02	007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.744.750.000	459.500.000	459.500.000	-2.285.250.000
3	26	2	1.02	009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.330.250.000			-2.330.250.000
3	26	2	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.700.000.000	3.338.000.000	10.552.283.000	638.000.000
3	26	2	1.03	001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi		100.000.000	100.000.000	100.000.000
3	26	2	1.03	002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	200.000.000	50.000.000	50.000.000	-150.000.000
3	26	2	1.03	004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		1.468.000.000	8.870.466.000	1.468.000.000
3	26	2	1.03	007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.500.000.000			-2.500.000.000
3	26	2	1.03	009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi		150.000.000	150.000.000	150.000.000
3	26	2	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi		650.000.000	461.817.000	650.000.000
3	26	2	1.03	0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi		350.000.000	350.000.000	350.000.000

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA 2025 (Rp)	Finalisasi RENJA 2026 (Rp)	RENJA 2026 (Rp)	SELISIH
3	26	2	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		570.000.000	570.000.000	570.000.000
3	26	2	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.100.000.000	160.000.000	120.000.000	-940.000.000
3	26	2	1.04	006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah				0
3	26	2	1.04	008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar				0
3	26	2	1.04	009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	500.000.000	80.000.000	60.000.000	-420.000.000
3	26	2	1.04	0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	600.000.000	80.000.000	60.000.000	-520.000.000
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	7.237.073.000	2.646.180.000	2.132.582.000	-4.590.893.000
3	26	3	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	7.237.073.000	2.646.180.000	2.132.582.000	-4.590.893.000
3	26	3	1.01	001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.137.073.000	900.000.000	386.402.000	-4.237.073.000
3	26	3	1.01	005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	900.000.000	350.000.000	350.000.000	-550.000.000
3	26	3	1.01	006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.200.000.000	1.396.180.000	1.396.180.000	196.180.000

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA 2025 (Rp)	Finalisasi RENJA 2026 (Rp)	RENJA 2026 (Rp)	SELISIH
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.070.000.000	1.990.000.000	1.990.000.000	920.000.000
3	26	4	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	400.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	900.000.000
3	26	4	1.01	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		100.000.000	100.000.000	100.000.000
3	26	4	1.01	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar		100.000.000	100.000.000	100.000.000
3	26	4	1.01	006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	400.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	700.000.000
3	26	4	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	670.000.000	690.000.000	690.000.000	20.000.000
3	26	4	1.02	005	Pengembangan Sistem Pemasaran		100.000.000	100.000.000	100.000.000
3	26	4	1.02	0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah		80.000.000	80.000.000	80.000.000
3	26	4	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual		350.000.000	350.000.000	350.000.000
3	26	4	1.02	0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah		80.000.000	80.000.000	80.000.000
3	26	4	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah		80.000.000	80.000.000	80.000.000
3	26	4	1.02	008	Perlindungan Hasil Kreativitas	185.000.000			-185.000.000
3	26	4	1.02	0013	Perlindungan Hasil Kreativitas	185.000.000			-185.000.000
3	26	4	1.02	0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	300.000.000			-300.000.000
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.900.000.000	1.328.219.000	1.767.534.000	-1.571.781.000

KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA 2025 (Rp)	Finalisasi RENJA 2026 (Rp)	RENJA 2026 (Rp)	SELISIH	
3	26	5	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.950.000.000	930.000.000	1.367.534.000	-1.020.000.000
3	26	5	1.01	004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	800.000.000	300.000.000	300.000.000	-500.000.000
3	26	5	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	550.000.000	560.000.000	700.000.000	10.000.000
3	26	5	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	600.000.000	70.000.000	367.534.000	-530.000.000
3	26	5	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	950.000.000	398.219.000	400.000.000	-551.781.000
3	26	5	1.02	001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	300.000.000	98.219.000	100.000.000	-201.781.000
3	26	5	1.02	003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	650.000.000	300.000.000	300.000.000	-350.000.000
						48.085.573.000	31.283.992.000	36.835.367.000	-16.801.581.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, maka untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten khususnya di sektor pariwisata, telah dirumuskan 5 (lima) program utama, yang dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) subkegiatan.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 merupakan instrumen pelaksanaan pembangunan tahunan sektor pariwisata yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten, RPJMD, serta mengacu pada arah kebijakan nasional melalui RPJMN. Penyusunan rencana kerja ini bertujuan untuk memperkuat peran pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, serta meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat

4.1.1 Rencana Kerja Tahun 2026

Rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 diarahkan pada beberapa fokus utama, yaitu:

1. Pengembangan Destinasi Wisata: peningkatan kualitas infrastruktur, fasilitas, dan daya tarik destinasi unggulan seperti wisata bahari, budaya, dan ekowisata.
2. Penguatan Pemasaran dan Promosi: pemanfaatan teknologi digital, promosi terpadu, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk business matching dengan investor dan pelaku usaha.
3. Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata: pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global.
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif: fasilitasi subsektor ekonomi kreatif unggulan, seperti kuliner, kriya, dan seni pertunjukan berbasis budaya lokal.
5. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan: peningkatan kualitas pelayanan publik, sinergi lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, dan komunitas.

4.1.2 Rencana Pendanaan Tahun 2026

Pendanaan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten untuk mendukung kegiatan prioritas.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat, khususnya pada kegiatan pembangunan infrastruktur kepariwisataan.
3. Kemitraan dengan pihak ketiga, baik swasta maupun lembaga internasional, untuk mendukung promosi dan pengembangan ekonomi kreatif.

4. Sumber pendanaan sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Alokasi pendanaan difokuskan pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi penguatan daya saing pariwisata daerah, yaitu:

1. Program Pengembangan Destinasi Wisata → pembangunan dan penataan kawasan wisata unggulan.
2. Program Pemasaran Pariwisata → promosi melalui media digital, event pariwisata, dan kerja sama antar daerah.
3. Program Peningkatan SDM dan Ekonomi Kreatif → pelatihan, workshop, serta dukungan permodalan dan pemasaran produk ekraf.
4. Program Dukungan Manajemen dan Layanan Publik → peningkatan kualitas pelayanan, penguatan data pariwisata, serta monitoring dan evaluasi program.

4.1.3 Harapan dan Dampak

Dengan adanya rencana kerja dan pendanaan yang terarah, Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat posisi Banten sebagai destinasi wisata unggulan nasional, meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta menciptakan lapangan kerja baru melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Adapun uraian mengenai rencana kerja dan pendanaan untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatkan implementasi reformasi Birokrasi di Provinsi Banten		Indeks Reformasi Birokrasi		80			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Pariwisata	100%	80	19.663.468.000		
			Nilai AKIP Dinas Pariwisata		80,1			
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	140.200.000	Sekretaris	Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	15.200.000		Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	7.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	7.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	7.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	7.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Laporan	12.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	15.000.000		
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	25.000.000		
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	45.000.000		
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi APBD pada Dinas Pariwisata	100%	100 Persen	15.438.109.000	Sekretaris	Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		75 Orang	14.955.209.000		Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	440.900.000		
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	17.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	5.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	5.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen bahan tanggapan hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	5.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Laporan	5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	5.000.000		
		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 Persen	1.000.000	Sekretaris	Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 laporan	1.000.000		
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 Persen	22.050.000	Sekretaris	Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Orang	7.500.000		
		Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100 Orang	14.550.000		
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 Persen	576.905.000	Sekretaris	Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000		Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	132.530.000		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	164.375.000		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	20.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	40.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	200.000.000		
		Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	5.000.000		
		Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	5.000.000		
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 Persen	840.000.000	Sekretaris	Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12 Unit	240.000.000		Provinsi Banten
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	600.000.000		
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 Persen	1.576.400.000	Sekretaris	Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	374.524.720		Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.201.875.280		
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 Persen	1.068.804.000	Sekretaris	Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		6 Unit	241.239.000		Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		26 Unit	207.389.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya		76 Unit	60.176.000		
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	560.000.000		
Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (Milyar Rupiah)		16.310		Kepala Dinas	Provinsi Banten
			Nilai PDRB Ekonomi Kreatif (Milyar Rupiah)		74.560		Kepala Dinas	Provinsi Banten
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Satuan : persen)	5%	5,20%	11.281.783.000	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Provinsi Banten
		Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		100	150.000.000	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		4 Lokasi	100.000.000	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	
		Sub Kegiatan : Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah		1 Dokumen	50.000.000	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		100 %	459.500.000	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		2 Lokasi	459.500.000		
		Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		100 %	10.552.283.000	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Khusus Ekonomi (Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang RIPPPDA; Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang RTRW)
		Sub Kegiatan : Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan		4 Lokasi	100.000.000		
		Sub Kegiatan : Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi		1 Dokumen	50.000.000		
		Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara		9 Unit	8.870.466.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi		1 Dokumen	150.000.000		
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan		375 Orang	461.817.000		
		Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring Tata kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata		4 Kegiatan	350.000.000		
		Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		4 Laporan	570.000.000		
		Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	120.000.000	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)		2 Unit Usaha	60.000.000		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi		1 Laporan	60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program : Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Satuan : persen)		5,18%	2.132.582.000	Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata	Negara Kesatuan Republik Indonesia
		Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 %	100 %	2.132.582.000	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Negara Kesatuan Republik Indonesia
		Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Satuan : Dokumen)		3 Dokumen	386.402.000		Negara Kesatuan Republik Indonesia
		Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)		1 Dokumen	350.000.000		Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)		9 Kegiatan	1.396.180.000		Provinsi Banten
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Satuan : persen)		6,91%	1.990.000.000	Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;	Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100 %	100 %	1.300.000.000	Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;	Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar		1 Laporan	100.000.000		
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula		1 Laporan	100.000.000		
		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik		2 Dokumen	1.100.000.000		
		Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	100 %	690.000.000	Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;	Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif		1 Dokumen	100.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah		1 Dokumen	80.000.000		
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual		50 Orang	350.000.000		
		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah		1 Lembaga	80.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah		1 Dokumen	80.000.000		
		Program : Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (satuan : persen)		2,41%	1.767.534.000	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Banten
		Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		100 %	1.367.534.000	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (satuan : Orang)		100 Orang	300.000.000		Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)		1050 Orang	700.000.000		Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)		50 Orang	367.534.000		Provinsi Banten
		Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Tercapainya Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 %	100 %	400.000.000	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (satuan : Orang)		50 Orang	100.000.000		Provinsi Banten
		Sub Kegiatan : Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di bidang Ekonomi Kreatif (satuan : Orang)		100 Orang	300.000.000		Provinsi Banten
TOTAL PAGU ANGGARAN							36.835.367.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD memiliki arti yang sangat penting dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan daerah. RENJA merupakan wujud nyata tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui pendekatan perencanaan yang berkelanjutan

Rancangan Akhir RENJA SKPD menjadi sarana strategis untuk merumuskan isu-isu prioritas, menetapkan fokus penanganan permasalahan pembangunan, serta menjawab tuntutan masyarakat dan kebutuhan daerah secara lebih terarah dan terukur.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2026, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Banten Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara:

1. Terkoordinasi antar bidang dan antar sektor,
2. Terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya,
3. Sinergis dalam mencapai sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, diharapkan adanya peran aktif seluruh bidang teknis sebagai unit satuan kerja di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, guna mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025–2029.